PENGARUH PERLINDUNGAN HUKUM, ORIENTASI ETIKA IDEALISME, ORIENTASI ETIKA RELATIVISME DAN RETALIASI TERHADAP INTENSI WHISTLEBLOWING (SURVEI PADA MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI DI PROVINSI ACEH)

Azhari 'Efendi^{*1}, Nuraini^{*2}

^{1,2}Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala
e-mail: azharief2198@gmail.com^{*1}, nurainianzib@gmail.com^{*2}

Abstract

The purpose of this research is to know the: (1) the influence of legal protection, idealism ethical orientation and relativism ethical orientation simultaneously on whistleblowing intention, (2) the influence of legal protection has on whistleblowing intention, (3) the influence of idealism ethical orientation on whistleblowing intention, (4) the influence of relativism ethical orientation on whistleblowing intention, (5) the influence of retaliation on whistleblowing intention. The population of this study is 395 students from state universities in Aceh province. Sampling technique used was simple random sampling. The data source used in this study is primary data through the distribution of questionnaires to respondents. Data were analyzed using multiple regression analysis with SPSS 20 processing. The result from this research (1) Legal protection, idealism, relativism and retaliation have an influence together (simultaneously) on whistleblowing intentions. (2) Legal protection has a positively influence on whistleblowing intentions. (3) Idealism has a positive effect on whistleblowing intentions. (4) Relativism has not influence on whistleblowing intention. (5) Retaliation has not influence on whistleblowing intention

Keywords: *legal protection, idealism, relativism, retaliation, whistleblowing intention*

1. Pendahuluan

Kecurangan sering terjadi baik dalam ataupun luar negeri dengan karakteristiknya yang beragam. Pelaku kecurangan juga berasal dari berbagai jenis golongan dan latar belakang mereka yang berbeda-beda. Hasil Survey ACFE menunjukkan kasus *fraud* yang sering terjadi di Indonesia yaitu korupsi dengan persentase 67%, diteruskan dengan salah guna aktiva negara sebesar 31% dan manipulasi laporan keuangan sebesar 2% (ACFE Indonesia, 2016). Hasil survey yang lebih mengejutkan lagi yang dilakukan ACFE Indonesia adalah pelaku kecurangan-kecurangan yang paling banyak terjadi berasal dari latang belakang pendidikan tingkatan sarjana dan magister. Hal ini memperlihatkan bagaimana sikap dan tingkah laku tidak etis para individu yang terdidik ini.

Banyaknya kasus kecurangan akan menyebabkan merosotnya negara ini. Hal ini tidak boleh dipikirkan oleh pemerintah atau pejabat saja, tapi mahasiswa harus berkontribusi untuk mengatasi masalah ini. Sehingga mahasiswa diharuskan menjadi pelapor pergerakan demi kemajuan bangsa ini. Mahasiswa merupakan peserta didik yang kritis

mengenai hal yang terjadi di sekitar dirinya, serta mahasiswa juga disebut sebagai *agent of change* pembawa perubahan. Salah satu cara dengan menumbuhkan intensi atau kemauan untuk melaporkan kecurangan-kecurangan yang terjadi pada pihak berwajib (*whistleblowing*). Kata-kata *whistleblowing* tidaklah terdengar asing bagi mahasiswa, kecuali dalam masyarakat awam kata ini masih hal yang asing. *Whistleblowing* adalah sebuah aksi yang dilaksanakan oleh seseorang maupun sekumpulan orang dalam upaya memberitahukan kecurangan yang berlangsung pada organisasi atau komunitas (Near & Miceli, 1985).

Whistleblowing merupakan salah satu fenomena yang sedang populer pada abad 21 mengenai ketidakpuasan karyawan terhadap manajemen dalam lingkungan kerja. Intensi *whistleblowing* membutuhkan keyakinan serta keberanian dalam pelaksanaannya. Persoalan itu, bukanlah hal yang mudah. *Whistleblowing* adalah tentang pelaporan atau publikasi pelanggaran (Hersh, 2002). Mungkin ada risiko pembalasan, yang bisa mengakibatkan hilangnya pekerjaan, hubungan dan kesehatan mental,

tetapi konsekuensinya tidak melaporkan bisa sangat serius. Menjadi whistleblower, tentunya tidaklah menutup kemungkinan adanya konsekuensi yang diterima dari sebagian oknum yang tidak menyukai intensi whistleblowing. Walaupun, tindakan intensi whistleblowing mendapatkan perlindungan hukum, hal ini tidak mencukupi menjaga keamanan pelapor (*whistleblower*) yang memungkinkan kehilangan pekerjaannya. Sehingga, seseorang tersebut ragu-ragu untuk melakukan intensi whistleblowing.

Menurut KNKG (2008) salah satu manfaat dari penerapan sistem *whistleblowing* adalah munculnya kesegaran dalam melakukan sebuah perilaku yang melanggar etik, dan mampu memperluas keyakinan pada sistem pelaporan beroperasi secara efektif. Adanya sistem *whistleblowing* ini, bukan semata-mata bertindak menjadi medium untuk melaporkan penipuan yang terjadi, tetapi juga dijadikan sebuah sistem pengawasan. Dengan kata lain, sistem whistleblowing dapat digunakan sebagai alat mendeteksi kejadian yang berada pada komunitas/organisasi, baik itu penyimpangan perilaku serta diskriminasi lainnya yang tidak cocok dengan standar etika yang digunakan dalam institusi. Sehingga, apabila diterapkan dengan sungguh-sungguh, sistem *whistleblowing* ini juga bisa menjadi pengawas dalam organisasi.

Orang yang melakukan tindakan *whistleblowing* disebut *whistleblower*. *Whistleblower* yaitu seseorang yang berani dalam mengungkapkan sebuah kegagalan atau skandal yang ada (Poluakan, Saerang, & Lambey, 2017). Awal mulanya whistleblower dianggap sebagai individu yang tidak loyal dikarenakan menjatuhkan perusahaan/badan/organisasinya atau mengungkapkan kejelekan pada perusahaan/badan/organisasinya.

Whistleblowing mulai diakui oleh pemerintah (Kompasiana.com, 2013). Bahkan, negara memberikan perlindungan kepada whistleblower yang memiliki bukti dan fakta akurat berisikan kebenaran. Di tahun 2018, negara Indonesia akan memberikan penghargaan atau hadiah kepada whistleblower dalam bentuk premi maksimal sebesar Rp200 juta oleh pemerintah. Hal ini tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2018 yang baru-baru ini telah ditanda tangani oleh bapak presiden RI. Aturan tersebut berisikan tata cara pelaksanaan peran masyarakat dan pemberian penghargaan dalam

pencegahan dan pemberantasan tindak korupsi (TEMPO.CO, 2018). Dengan adanya peraturan tersebut, diharapkan dapat memotivasi whistleblower untuk berperan aktif untuk mengurangi kecurangan.

Kegagalan whistleblower tidak lah bisa dipungkiri. Sebuah artikel pada situs (Theatlantic.com, 2014) mengupas permasalahan mengenai whistleblowing. Selain kegigihan, keberuntungan merupakan faktor penting suksesnya whistleblowing. Blower-blower yang sukses bukanlah mereka yang memiliki kebenaran paling mengejutkan, tetapi mereka adalah orang-orang yang kebetulan memasuki tren saat ini. Kisah mereka sesuai dengan apa yang media butuhkan saat ini, apa yang membuat publik marah, atau apa yang dapat digunakan politisi untuk modal politik pada waktu tertentu. Alih-alih menekan, oleh karena itu, kebenaran adalah masalah tren. Artikel pada situs (Kompas.com, 2018) mengisahkan Christopher Wylie, seorang mahasiswa di AS yang menjadi whistleblower mengungkapkan pencurian data personal pemakai facebook oleh firma Cambridge Analytica. Dalam wawancaranya dengan The Guardian, Wylie mengaku bahwa firma Cambridge Analytica tempat dia bekerja mampu memanen data facebook 50-60 juta dengan tempo 2-3 bulan sajadan menerima suntikan dana sekitar Rp 206 miliar dari Robert Mercer yang merupakan tokoh kunci politik di pemilu AS. Data yang dipanen tersebut digunakan sebagai narasi politik bukan sebagai pemilih.

2. Kajian Pustaka

Theory Of Planned Behavior

Memiliki tujuan untuk memahami serta memprediksi dampak dari niat berperilaku, pengidentifikasian strategi dalam upaya perubahan sikap serta menjelaskan perilaku manusia secara nyata. Ajzen (1991) menjelaskan bahwa faktor motivasional yang berpengaruh pada perilaku adalah intensi (niat). Intensi dilihat dari seberapa kuat seseorang berusaha ataupun seberapa banyak usaha yang dijalankan dalam memperlihatkan sebuah perilaku.

Intensi whistleblowing mempunyai keterikatan dengan teori perilaku terencana, dikarenakan menghubungkan dengan niat atau kemauan seseorang dalam bertindak. Chiu (2002) menerangkan intensi whistleblowing itu mengarah pada kemungkinan seseorang yang berkeinginan ikut serta dalam tindakan *whistleblowing*.

Perlindungan hukum

Menurut Soerjono Soekanto (1984) perlindungan hukum adalah upaya pemberian bantuan dan pemenuhan hak agar menghadirkan rasa aman pada saksi maupun korban. Perlindungan hukum yang ideal adalah dengan memberi imbalan, perawatan, dan perlindungan dari semua tuduhan sebagai kompensasi atas apa yang telah diungkapkan oleh pengungkap fakta, apakah ia salah satu pelaku atau bukan (Nixson et al., 2013). Dalam UU nomor 31 tahun 2014 menyebutkan ancaman merupakan segala macam jenis perilaku dengan konsenkuensi, baik secara langsung ataupun tidak langsung, sehingga menyebabkan saksi merasa takut bertindak sesuai kesaksiannya.

Berlakunya sistem perlindungan bisa meningkatkan keberanian individu maupun kelompok terhadap pengungkap fakta (Yustrisia, 2017).

Orientasi Etika

Forsyth (1980) mengatakan orientasi etika merupakan perilaku profesional yang berhubungan dekat diantara nilai-nilai moral yang berlaku sebagai tujuan utamanya serta ada dua karakteristik penggerakannya diantaranya idealisme dan relativisme.

a. Idealisme

Idealisme diartikan sebuah sikap yang beranggapan bahwa perilaku yang benar serta tepat dapat menghasilkan dampak yang diharapkan. Seseorang yang idealis memiliki prinsip, jika merugikan individu lain merupakan hal yang harus bisa dihindarkan serta mereka tidak mungkin berperilaku yang mengacu pada perilaku yang menghasilkan dampak negatif. Pengukuran orientasi etika idealisme diukur dengan indikator seorang individu tidak diperbolehkan melakukan perilaku yang bisa mengancam kesejahteraan serta martabat orang lain, sikap agar tidak merugikan individu lain sekecil apapun, dan perilaku bermoral dianggap sebagai tindakan yang mendekati kesesuaian dengan tindakan yang harus ada (Yulianto, 2015).

b. Relativisme

Etika relativisme adalah teori yang mengemukakan bahwa sebuah perilaku bisa disebut benar atau salah, etis atau tidak, mengacu pada opini masyarakat. Sikap relativisme juga memperhitungkan berbagai macam nilai dari lingkungan sekitar serta dirinya. Teori ini

mempercayai bahwa setiap orang maupun kelompok mempunyai pandangan etis yang berbeda-beda. Jadi, etika relativisme maupun relativisme etis yaitu pandangan yang menganggap tidak ada kriteria etis yang dapat dikatakan mutlak. Dalam penalaran moralnya, individu diharuskan senantiasa mengikuti nilai-nilai moralitas yang ada pada masyarakat dimanapun dia tinggal.

Etika yang berbeda-beda pada sebuah situasi dalam masyarakat dengan masyarakat yang lain, pertimbangan etika mengenai relasi antara oranglain begitu rumit, sehingga seseorang sebaiknya diijinkan membentuk standar etik individu sendiri, dan penilaian terhadap ketidakjujuran sebagai perilaku moral atau immoral bergantung pada keadaan yang dihadapi (Yulianto, 2015).

Retaliasi

Retaliasi atau sering disebut aksi balas dendam merupakan pengembalian tindakan ditunjukkan kepada seseorang atas suatu sikap yang pernah dirasakan sebelumnya.

Retaliasi dapat berupa pemutusan hubungan kerja, pemberian pekerjaan yang lebih banyak, pengucilan, pengancaman, dan lain-lain. Tak berhenti disitu saja, retaliasi tidak sekedar terjadi pada whistleblower saja, tetapi dapat juga terjadi pada keluarga dari whistleblower tersebut.

Kemungkinan aksi retaliasi dikarenakan adanya dorongan atas keinginan organisasi untuk membuat *whistleblower* diam (menutup mulut ketika mengetahui adanya kecurangan dalam organisasi), mendiskreditkan whistleblower, mencegah pihak luar mengetahui, dan mencegah whistleblower melakukan tindakan yang lain. Menurut Mesmer-Magnus & Viswesvaran (2005) memprediksi antara retaliasi dengan whistleblower terbagi atas 4 ciri, antara lain: (1) karakteristik *whistleblower*; (2) perilaku yang dipilih oleh whistleblower dalam pelaporan kesalahan organisasi; (3) variabel situasional atau lingkungan yang berhubungan dengan organisasi; (4) karakteristik kecurangan.

Intensi Whistleblowing

Chiu (2002) menerangkan intensi whistleblowing itu mengarah pada kemungkinan

seseorang yang berkeinginan ikut serta dalam tindakan *whistleblowing*. *Whistleblowing* adalah sebuah aksi yang dilaksanakan oleh seseorang maupun sekumpulan orang dalam upaya memberitahukan kecurangan yang berlangsung pada organisasi atau komunitas (Near & Miceli, 1985). KNKG (2008) mengartikan *whistleblowing* adalah aksi pengungkapan perbuatan ataupun kesalahan karena tidak mematuhi hukum, tindakan yang tidak mencerminkan moral atau ketidak etisan serta perbuatan lain yang bisa merugikan perusahaan/organisasi ataupun pihak yang memiliki kepentingan.

Menurut Near & Miceli (1985) *whistleblowing* merupakan sebuah aksi yang dilaksanakan oleh perorangan atau kelompok untuk membeberkan kecurangan yang berlangsung baik dalam instansi maupun organisasi. *Whistleblowing* bisa dikatakan sebagai sebuah proses yang didalamnya mengikutsertakan faktor sosial organisasional maupun faktor pribadi.

3. Metode Penelitian

Desain Penelitian

Desain penelitian adalah perancangan suatu penelitian sebagaimana diungkapkan oleh Sekaran & Bougie (2013:152) mencakup serangkaian opsi yang berkaitan dengan seseorang ketika pengambilan keputusan, memuat tentang tujuan penelitian, unit analisis penelitian yang digunakan, horizon waktu suatu penelitian, jenis investigasi yang diterapkan, tingkat intervensi yang digunakan, dan situasi studi.

Penelitian ini menggunakan tingkat intervensi minimal. Horizon waktu yang digunakan "*Cross Sectional*".

Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian adalah universitas negeri di provinsi Aceh.

Subjek Penelitian

Responden atau partisipasi dalam penelitian ialah mahasiswa di 5 universitas negeri di provinsi Aceh.

Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian yaitu data primer. Cara pengumpulan data primer menggunakan

kuesioner yang berisikan beberapa pertanyaan yang dibagikan kepada responden yaitu mahasiswa.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *simple random sampling*. Sugiyono (2015) mengartikan *simple random sampling* sebagai pengambilan sampel secara random tanpa melihat kelas pada populasinya.

4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Analisis Karakteristik Responden

Pengumpulan data dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner kepada 395 responden mahasiswa universitas negeri di provinsi Aceh secara tidak langsung dengan perantara dalam bentuk elektronik yaitu google document dengan menggunakan link <https://goo.gl/forms/FyB1he7S0dmVFpoE3>. Adapun sampel tersebut, sebagai berikut:

Tabel 4.1

Data Sampel Penelitian

Universitas	Fr	Percent	Cumulative Percent
UIN AR-RANIRY	123	28,3	37,3
UNIMAL	83	19,1	56,5
UNSAM	30	6,9	63,4
UNSYIAH	123	28,3	91,7
UTU	36	8,3	100,0
Total	395	100,0	

Sumber: data diolah, 2019

Jenis Kelamin

Pengelompokan jenis kelamin mahasiswa universitas negeri di Provinsi Aceh yang menjadi responden antara lain:

Tabel 4.2

Pengelompokan Responden berdasarkan Jenis Kelamin

	Fr	Percent	Cumulative Percent
Laki-Laki	200	46,1	55,1
Perempuan	195	44,9	100,0
Total	395	100,0	

Sumber: Data diolah, 2019

Tampilan tabel 4.2 menjelaskan mengenai data responden berdasarkan jenis kelamin. Diketahui bahwa jumlah responden yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 200 orang, sedangkan perempuan

berjumlah 195 orang yang telah mengisi kuesioner penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok jenis kelamin mahasiswa universitas negeri di Provinsi Aceh yang menjadi responden didominasi oleh laki-laki sebanyak 200 orang atau 55,1%. Hasil survei dengan pertanyaan kuesioner “Saya akan mencoba melakukan tindakan whistleblowing apabila mengetahui adanya fraud atau korupsi yang terjadi”. diketahui bahwa laki-laki menjawab lebih sering menjawab “Ya” dibandingkan perempuan., memperlihatkan bahwa laki-laki lebih memungkinkan menjadi whistleblower. Hal ini selaras dengan fenomena yang ada seperti dalam artikel pada situs (Kompas.com, 2018) mengisahkan Christopher Wylie, seorang mahasiswa di AS yang menjadi whistleblower mengungkapkan pencurian data personal pemakai facebook oleh firma Cambridge Analytica.

Usia Responden

Tampilan gambar 4.1 menjelaskan usia data responden. Diketahui bahwa responden terbanyak berusia 22 tahun dan responden paling sedikit berusia 25 dan 32 tahun yang telah mengisi kuesioner penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa

universitas negeri di Provinsi Aceh yang berusia 22 tahun menjadi responden mendominasi sebanyak 253 orang atau 38,7% dengan total responden sebanyak 395 orang. Pengelompokan usia mahasiswa universitas negeri di Provinsi Aceh yang menjadi responden, sebagai berikut.

Gambar 4.1
Usia Responden

Program Studi atau Jurusan

Hasil pengelompokan Program Studi atau Jurusan mahasiswa Universitas Negeri di Provinsi Aceh, yaitu:

Tabel 4.3
Program Studi atau Jurusan

No.	Prodi/Jurusan	Fr	Percent	Cumulative Percent
1	Agribisnis	32	8,10	8,1
2	Agroteknologi	5	1,27	9,37
3	Akuntansi	65	16,46	25,82
4	Bhs Arab	1	0,25	26,07
5	Bhs Inggris	4	1,01	27,09
6	EKI	7	1,77	28,86
7	Ekonomi Syariah	3	0,76	29,62
8	EKP	27	6,84	36,45
9	Fisika	1	0,25	36,71
10	Fisip/Ian	10	2,53	39,24
11	Hukum	3	0,76	40,00
12	Hukum Ekonomi	2	0,51	40,51
13	Hukum Islam	1	0,25	40,76
14	Hukum Keluarga	13	3,29	44,05
15	Hukum Pidana	1	0,25	44,30
16	Hukum Tata negara	5	1,27	45,57
17	Ilmu Administrasi negara	64	16,20	61,77
18	Ilmu Al-qur'an dan Hadist	14	3,54	65,32
19	Ilmu Ekonomi	5	1,27	66,58
20	Ilmu Hukum	12	3,04	69,62
21	Ilmu Kelautan	1	0,25	69,87

No.	Prodi/Jurusan	Fr	Percent	Cumulative Percent
21	Ilmu Komunikasi	1	0,25	70,13
23	Ilmu Perpustakaan	1	0,25	70,38
24	Ilmu Politik	1	0,25	70,63
25	Informatika	6	1,52	72,15
26	Kip Pg Paud	1	0,25	72,40
27	Manajemen	27	6,84	79,24
28	Matematika	1	0,25	79,49
29	P. Agama	2	0,51	80,00
30	P. Biologi	6	1,52	81,52
31	P. Ekonomi	2	0,51	82,02
32	P. Fisika	3	0,76	82,78
33	P. Geografi	2	0,51	83,29
34	P. Jasmani	2	0,51	83,80
35	P. Kedokteran	18	4,56	88,35
36	P. Kimia	2	0,51	88,86
37	P. Sejarah	3	0,76	89,62
38	Perbankan syariah	3	0,76	90,38
39	Pertambangan	2	0,51	90,88
40	Peternakan	1	0,25	91,14
41	Psikologi	2	0,51	91,64
42	Sosiologi	12	3,04	94,68
43	T. Elektro	7	1,77	96,45
44	T. Industri	7	1,77	98,23
45	T. Kimia	1	0,25	98,48
46	T. Mesin	5	1,27	99,75
47	T. Sipil	1	0,25	100,00
	Total	395	100	

Sumber: data diolah, 2019

Tampilan tabel 4.3 menjelaskan Program Studi atau Jurusan data responden. Diketahui bahwa Program Studi atau Jurusan terbanyak adalah Akuntansi di ikuti dengan Ilmu Administrasi Negara dan Program Studi atau Jurusan paling sedikit dipegang oleh Fisika, Bahasa Arab, Hukum Islam, Hukum Pidana, Ilmu Kelautan, Ilmu Komunikasi, Ilmu Perpustakaan, Ilmu Politik, Kip Pg Paud, Matematika, Peternakan, Teknik Kimia dan Teknik Sipil dengan masing responden 1 oarang.yang telah mengisi kuesioner penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa universitas negeri di Provinsi Aceh Program Studi atau Jurusan Akuntansi menjadi

responden mendominasi sebanyak 65 orang atau 15% dengan total keseluruhan 395 responden.

Analisis Tanggapan Responden

Tanggapan Responden pada Intensi Whistleblowing

Hasil penelitian tanggapan responden terhadap intensi *whistleblowing* antara lain:

Tabel 4.4
Intensi whistleblowing

No	Intensi Whistleblowing	Selalu		Sering		Kadang-kadang		Jarang		Tidak Pernah	
	(Y)	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1.	Jika mengetahui adanya indikasi fraud atau korupsi yang terjadi pada instansi, maka akan memunculkan niat (intensi) saya untuk melakukan whistleblowing	158	38,5	183	46,3	45	11,4	10	2,5	5	1,3
2.	Adanya dampak kerugian yang besar membuat saya akan lebih mungkin menjadi whistleblower.	193	48,9	148	37,5	43	10,9	10	2,5	1	0,3
3.	Saya akan mencoba melakukan tindakan whistleblowing apabila mengetahui adanya fraud atau korupsi yang terjadi.	160	40,5	181	45,8	40	10,1	13	3,3	1	0,3
4.	Saya selalu menyiapkan perencanaan yang matang sebelum melakukan tindakan whistleblowing untuk mengungkap fraud atau korupsi yang terjadi pada instansi	170	43,0	176	44,6	42	10,6	5	1,3	2	0,5
5.	Jika mengetahui adanya fraud atau korupsi yang terjadi pada instansi, maka saya akan berusaha keras melakukan tindakan whistleblowing melalui saluran internal	159	40,3	171	43,3	54	13,7	11	2,8	0	0
6.	Jika saluran internal tidak memungkinkan, maka saya akan berusaha keras untuk melakukan tindakan whistleblowing melalui saluran eksternal	153	38,7	172	43,5	52	13,2	16	4,1	2	0,5
No	Intensi Whistleblowing	SS		S		N		TS		STS	
	(Y)	F	%	F	%	F	(Y)	F	%	F	%
7.	Saya percaya bahwa pengorbanan akan membawa pada hasil yang lebih baik kedepannya	202	51,1	167	42,3	18	4,6	8	2,0	0	0

Sumber: data diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.4 diatas, diketahui bahwa pernyataan item 1 sebesar 46,3% responden menjawab “sering” menumbuhkan niat untuk melakukan pelaporan kecurangan. Pernyataan item 2 sebesar 48,9% responden menjawab “selalu” menjadi whistleblower jika adanya dampak kerugian atas fraud. Pernyataan item 3 sebesar 45,8% responden menjawab “sering” mencoba melakukan tindakan whistleblowing. Pernyataan item 4 sebesar 44,6% responden menjawab “sering” menyiapkan perencanaan yang matang sebelum melaporkan. Pernyataan item 5 sebesar 43,3% responden menjawab “sering” melakukan whistleblowing melalui saluran internal. Pernyataan item 6 sebesar 43,5% responden menjawab “sering” melakukan whistleblowing melalui saluran eksternal, jika saluran internal tidak berhasil. Pernyataan item 7 sebesar 51,1% responden menjawab “sangat setuju” jika pengorbanan akan membawa hasil yang lebih baik kedepannya.

4.2.2 Tanggapan Responden pada Perlindungan Hukum

Hasil penelitian terhadap tanggapan perlindungan hukum yaitu:

Tabel 4.5

Tanggapan Responden pada Perlindungan Hukum

No	Perlindungan Hukum	Selalu		Sering		Kadang-kadang		Jarang		Tidak Pernah	
	(X1)	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1.	Dengan adanya penghargaan harkat dan martabat manusia membuat saya melakukan tindakan whistleblowing.	178	45,1	163	41,3	37	9,4	12	3,0	5	1,3
2.	Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda, serta bebas dari ancaman yang berakumulasi, mendorong saya untuk melakukan whistleblowing	177	44,8	172	43,5	40	10,1	5	1,3	1	0,3
3.	Saya mendapatkan pembelaan dan perlindungan hukum yang adil dalam intansi melakukan whistleblowing.	170	43,0	148	37,5	58	14,7	13	3,3	6	1,5
4.	Adanya perlindungan hukum yang tidak diskriminatif akan mendorong saya untuk melakukan tindakan whistleblowing	184	46,6	158	40,0	47	11,9	6	1,5	0	0
5.	Adanya kepastian hukum membuat saya tidak akan enggan untuk memberikan diri memberikan kesaksian sebagai whistleblower.	159	40,3	188	47,6	40	10,1	7	1,8	1	0,3

Sumber: data diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.5 diatas, diketahui bahwa pernyataan item 1 sebesar 45,1% responden menjawab “selalu” melakukan whistleblowing jika adanya penghargaan harkat dan martabat. Pernyataan item 2 sebesar 44,8% responden menjawab “selalu” adanya dorongan menjadi whistleblower jika memperoleh

perlindungan keamanan pribadi dan lainnya. Pernyataan item 3 sebesar 43,0% responden menjawab “selalu” memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum yang adil ketika melakukan tindakan whistleblowing. Pernyataan item 4 sebesar 46,6% responden menjawab “selalu” mendorong responden melakukan tindakan whistleblowing jika perlindungan hukum tidak diskriminatif. Pernyataan item 5 sebesar 47,6% responden menjawab “sering” untuk memberanikan diri memberikan kesaksian jika ada kepastian hukum.

4.2.3 Tanggapan Responden pada Idealisme

Hasil penelitian terhadap tanggapan idealisme yaitu:

Tabel 4.6

Tanggapan Responden pada Idealisme

No	Idealisme	SS		S		N		TS		STS	
	(X2)	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1.	Melakukan tindakan yang merugikan orang lain, akan selalu menjadi tindakan yang salah, walaupun akan memberikan keuntungan bagi saya	181	45,8	175	44,3	26	6,6	9	2,3	4	1,0
2.	Tindakan kecurangan sekecil apapun tidak dapat ditolerir, sehingga mendorong saya untuk melakukan whistleblowing.	175	44,2	161	40,8	48	12,2	9	2,3	2	0,5
3.	Seorang individu tidak boleh melakukan tindakan yang dapat mengancam martabat dan kesejahteraan individu lain.	208	52,7	158	40,0	56	14,2	2	0,5	1	0,3
4.	Tindakan bermoral adalah tindakan yang hampir sesuai dengan tindakan yang sifatnya ideal atau sempurna	156	39,5	168	42,5	60	15,2	10	2,5	1	0,3
5.	Memutuskan suatu tindakan menyeimbangkan antara dampak positif dan negatif adalah perilaku yang tidak bermoral	147	37,2	153	38,7	68	17,2	19	4,8	8	2,0
6.	Tidak mengorbankan kesejahteraan orang lain adalah hal yang seharusnya saya lakukan	172	43,5	182	46,8	29	7,3	6	1,5	3	0,8

Sumber: Data diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.5 diatas, diketahui bahwa pernyataan item 1 sebesar 45,8% responden menjawab “sangat setuju” bahwa tindakan merugikan orang lain merupakan tindakan yang salah. Pernyataan item 2 sebesar 44,2% responden menjawab “sangat setuju” bahwa tindakan kecurangan sekecil apapun tidak dapat ditolerir. Pernyataan item 3 sebesar 52,7% responden menjawab “sangat setuju” bahwa seseorang tidak boleh melakukan tindakan yang mengancam martabat serta kesejahteraan orang lain. Pernyataan item 4 sebesar 42,5% responden menjawab “setuju” bahwa tindakan bermoral merupakan tindakan yang sifatnya ideal. Pernyataan item 5 sebesar 38,7% responden menjawab “setuju” jika suatu tindakan menyeimbangkan dampak positif dan negatif adalah perilaku tidak bermoral. Pernyataan item 6 sebesar

46,8% responden menjawab “setuju” bahwa tidak mengorbankan kesejahteraan orang lain adalah hal yang seharusnya dilakukan.

4.2.4 Tanggapan Responden Relativisme

Hasil penelitian terhadap tanggapan relativisme yaitu:

Tabel 4.7

Tanggapan Responden pada Relativisme

No	Orientasi Etika Relativisme	SS		S		N		TS		STS	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1.	Tipe-tipe moralitas yang berbeda tidak dapat dibandingkan dengan keadilan.	81	20,5	104	26,3	128	32,4	74	18,7	8	2,0
2.	Standar moral seharusnya dibuat berdasarkan individu masing-masing, karena suatu tindakan yang bermoral dapat dianggap tidak bermoral oleh individu lain.	49	12,4	86	21,8	94	23,8	150	38,0	16	4,1
3.	Bagi saya, adanya aturan etika yang berbeda antara satu komunitas dengan komunitas yang lain, dan juga dengan penerapannya, berbeda antara satu situasi dengan situasi lainnya membuat saya ragu dalam intensi whistleblowing.	51	12,9	69	17,5	90	22,8	167	42,3	18	4,6
4.	Saya mempertimbangkan etika dalam hubungan antar orang lain.	69	17,5	160	40,5	108	27,3	52	13,2	6	1,5
5.	Saya seharusnya diijinkan untuk membentuk kode etik saya sendiri.	48	12,2	79	20,2	100	25,3	142	35,9	26	6,6
6.	Penetapan secara tegas suatu posisi etika yang mencegah beberapa tipe tindakan dapat dijadikan sebagai jalan saya untuk menciptakan hubungan dan penyusunan hubungan manusia yang lebih baik.	56	14,2	95	24,1	89	22,5	130	32,9	25	6,3
7.	Tidak adanya standar yang mengatur mengenai masalah berbohong, membuat saya melihat situasi terbelah dalam intensi whistleblowing.	61	15,4	85	21,5	66	16,7	149	37,7	34	8,6
8.	Bagi saya, sebuah kebohongan dinilai sebagai tindakan moral atau moral tergantung pada situasi yang terjadi.	47	11,9	83	21,0	98	24,8	141	35,7	26	6,6
9.	Bagi saya kecurangan dengan nilai material kecil tidak memberi potensi yang besar untuk dilaporkan, sehingga intensi whistleblowing tidak diperlukan.	38	9,6	62	15,7	66	16,7	164	41,5	65	16,3

Sumber: Data diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.7 diatas, diketahui bahwa pernyataan item sebesar 32,4% responden menjawab “netral” bahwa tipe moralitas yang bervariasi tidak dapat dibandingkan dengan keadilan. Pernyataan item 2 sebesar 38,0% responden menjawab “tidak setuju” jika standar moral berdasarkan individu masing-masing. Pernyataan item 3 sebesar 42,3% responden menjawab “tidak setuju” jika seseorang ragu dalam intensi whistleblowing dikarenakan adanya perbedaan komunitas, situasi dan penerapannya. Pernyataan item 4 sebesar 40,5% responden menjawab “setuju” jika mempertimbangkan etika saat berhubungan dengan orang lain. Pernyataan item 5 sebesar 35,9% responden menjawab “tidak setuju” jika diijinkan untuk membentuk kode etik sendiri. Pernyataan item 6 sebesar 32,9% responden menjawab “tidak setuju” jika adanya penetapan tegas yang mencegah tindakan yang dapat menciptakan penyusutan hubungan manusia lebih baik. Pernyataan item 7 sebesar 37,7% responden

menjawab “tidak setuju” melihat situasi dalam intensi whistleblowing karena tidak ada standar yang mengatur. Pernyataan item 8 sebesar 35,7% responden menjawab “tidak setuju” jika menilai kebohongan sebagai tindakan bermoral atau tidak berdasarkan situasi. Pernyataan item 9 sebesar 41,5% responden menjawab “tidak setuju” jika intensi whistleblowing tidak diperlukan atas potensi kecurangan yang kecil.

4.2.5 Tanggapan Responden pada Retaliiasi

Hasil Hasil penelitian terhadap tanggapan retaliiasi tertera dibawah ini.

Tabel 4.8

Tanggapan Responden pada Retaliiasi

No	Retaliiasi	SS		S		N		TS		STS	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1.	Saya akan mengungkapkan kecurangan yang saya temukan walaupun ada resiko yang akan saya hadapi.	70	17,7	127	32,2	105	26,2	72	18,2	21	5,3
2.	Saya yang belum berpengalaman akan membuat saya diam saja apabila mengetahui tindak kecurangan karena takut terhadap pembalasan yang akan diterima atas tindakan whistleblowing.	31	7,8	67	17,0	118	29,9	147	37,2	32	8,1
No	Retaliiasi	Selalu		Sering		Kadang-kadang		Jarang		Tidak pernah	
	(X4)	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
3.	Saya yang memiliki pengalaman dan informasi yang cukup akan melakukan pembalasan balik jika saya mengalami retaliasi atas whistleblowing.	54	13,7	147	37,2	112	28,4	70	17,7	12	3,0
No	Retaliiasi	SS		S		N		TS		STS	
	(X4)	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
4.	Adanya dukungan dari manajemen puncak dan supervisor serta penerintah akan membuat saya semakin berani untuk melakukan whistleblowing yang saya temukan.	70	18,7	175	44,3	95	24,1	47	11,9	4	1,0
5.	Semakin tinggi perlindungan hukum terhadap whistleblowers (pelapor), maka tindakan retaliasi (balas dendam) atas whistleblowing akan semakin rendah.	83	21,0	166	42,0	75	19,0	63	15,9	8	2,0
No	Retaliiasi	Selalu		Sering		Kadang-kadang		Jarang		Tidak pernah	
	(X4)	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
6.	Saya akan mengalami ancaman jika melakukan whistleblowing.	152	38,5	183	46,3	43	11,4	10	2,5	5	1,3

Sumber: data diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.8 diatas, diketahui bahwa pernyataan item 1 sebesar 32,2% responden menjawab “setuju” tetap mengungkapkan kecurangan walau ada resiko yang dihadapi. Pernyataan item 2 sebesar 37,2% responden menjawab “tidak setuju” jika tetap diam saat mengetahui kecurangan walau belum berpengalaman. Pernyataan item 3 sebesar 37,2% responden menjawab “sering” melakukan pembalasan balik jika mengalami retaliasi. Pernyataan item 4 sebesar 44,3% responden menjawab “setuju” bahwa dukungan dari manajemen memberikan individu dalam melakukan pelaporan. Pernyataan item 5 sebesar 42,0% responden menjawab “setuju” bahwa tindakan retaliasi bisa ditekan dengan adanya perlindungan hukum. Pernyataan item 6 sebesar 46,3% responden menjawab “sering” bahwa mengalami ancaman jika melakukan whistleblowing.

4.2.6. Tanggapan Responden Terhadap Sistem Pelaporan

Indikator pertanyaan ini memiliki opsi jawaban “Ya” atau “Tidak”. Pertanyaan tersebut antara lain: 1. Apakah anda mengetahui adanya sistem pelaporan di universitas ada?”. Hasil Tanggapan terhadap sistem pelaporan tersebut tertera dibawah ini.

Gambar 4.2

Tanggapan Responden Tentang Sistem Pelaporan

Gambar 4.2 menjelaskan bahwa mahasiswa yang menjawab “YA” hanya berkisar 9,9% dan yang menjawab “TIDAK” berkisar 90,1%. Hal ini menjadi miris dikarenakan banyak mahasiswa tidak mengetahui apakah universitasnya memiliki sistem pelaporan. Persoalan Kedua yaitu: “2. Apa nama sistem tersebut?”. Berdasarkan Survei yang dilakukan oleh peneliti hasil, maka hasil yang diperoleh dari jawaban responden adalah Universitas Syiah Kuala memiliki Sistem Pelaporan yaitu SIPL UNSYIAH, sedangkan Universitas lainnya menggunakan BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) sebagai wadah pengaduan.

Uji Kualitas Data

Hasil Uji Validitas

Hasil pengujian valid data pada setiap butir pertanyaan variabel yang tertera dapat dilihat pada Lampiran 4 uji validitas dengan menggunakan 200 sampel responden dalam menjawab kuesioner. Hasil output IBM SPSS versi 20 uji validitas perlindungan hukum (X1) secara keseluruhan dinyatakan valid karena rhitung lebih besar daripada rtabel dengan taraf

sebesar 0,1388 (5%), diartikan bahwa seluruh item pernyataan pada kuesioner dapat digunakan untuk mengukur perlindungan hukum (X1).

Hasil output IBM SPSS versi 20 uji validitas idealisme (X2) secara keseluruhan dinyatakan valid karena rhitung lebih besar daripada rtabel dengan taraf sebesar 0,1388 (5%), diartikan bahwa seluruh pernyataan pada kuesioner dapat digunakan untuk mengukur idealisme (X2). Hasil output IBM SPSS versi 20 uji validitas relativisme (X3) secara keseluruhan dinyatakan valid karena rhitung lebih besar daripada rtabel dengan taraf sebesar 0,1388 (5%), diartikan bahwa seluruh item pernyataan pada kuesioner dapat digunakan untuk mengukur relativisme (X3).

Hasil output IBM SPSS versi 20 uji validitas retaliasi (X4) secara keseluruhan dinyatakan valid karena rhitung lebih besar daripada rtabel dengan taraf sebesar 0,1388 (5%), diartikan bahwa seluruh item pernyataan pada kuesioner dapat digunakan untuk mengukur retaliasi (X4). Hasil output IBM SPSS versi 20 uji validitas intensi whistleblowing (Y) secara keseluruhan dinyatakan valid karena rhitung lebih besar daripada rtabel dengan taraf sebesar 0,1388 (5%), terlampir pada lampiran 5 uji validitas dan realibilitas halaman 104, diartikan bahwa seluruh item pernyataan pada kuesioner dapat digunakan untuk mengukur intensi whistleblowing (Y).

Hasil Uji Reliabilitas

Hasil uji Realibilitas dengan menggunakan 395 sampel responden dalam menjawab kuesioner, diketahui nilai cronbach’s alpha setiap variabel X dan Y lebih besar daripada r tabel yaitu 0,600. Hal ini dapat disimpulkan bahwa item-item setiap pernyataan dalam kuesioner atas jawaban responden dikatakan reliabel atau handal.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Hasil pengujian dapat dilihat dalam tabel 4.10 dibawah ini menggunakan kolmogorov-smirnov.

Tabel 4.10
Hasil Uji Normalitas

	Unstandardized Residual
N	395
Normal Parameters ^{a,b}	
Mean	0E-7
Std. Deviation	0,18759405
Most Extreme	0,067
Differences	0,067
Negative	-0,046
Kolmogorov-Smirnov Z	1,340
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,055

Sehingga ditarik kesimpulan dinyatakan bahwa data terdistribusi secara normal karena berada diatas nilai kriteria ukur 0,05.

Uji Multikolonieritas

Adapun hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 4.11 dibawah ini,

Berdasarkan tabel 4.12 diatas nilai kolmogorov-smirnov sebesar 1.3440 dan nilai Sig 0,055 > 0,05.

Tabel 4.11
Hasil uji Multikolonieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(konstan)	4,296	0,716		6,002	0,000		
Perlindungan Hukum	0,591	0,058	0,465	10,248	0,000	0,698	1,433
Idealisme	0,317	0,054	0,269	5,846	0,000	0,678	1,475
Relativisme	-,038	0,017	-0,092	-2,249	0,025	0,856	1,168
Retaliasi	,029	0,034	0,035	0,844	0,399	0,823	1,215

Berdasarkan Tabel 4.13 diatas, diketahui bahwa nilai tolerance perlindungan hukum (X1), idealisme (X2), relativisme (X3), dan retaliasi (X4) yakni 0.698, 0,678, 0,856, 0,823 lebih besar dari 0,10. Sedangkan, nilai VIF perlindungan hukum (X1), idealisme (X2), relativisme (X3), dan retaliasi (X4) yakni 1,433, 1,475, 1,168, 1,215 lebih kecil dari 10,00. Data diatas menunjukkan tidak adanya korelasi maka tidak terjadi multikolonieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Hasil pengujian dapat dilihat dalam gambar 4.3 dibawah ini.

Gambar 4.3
Uji Heteroskedastistas

Berdasarkan tampilan gambar 4.3 diatas, diketahui bahwa tidak mempunyai masalah mengenai heteroskedastisitas. Hal ini dibuktikan dengan (1) titik-titik tidak berkumpul hanya di atas dan dibawah saja, (2) penyebaran titik data tidak membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali, (3) titik-titik data menyebar di sekitar angka 0. Hal ini menunjukkan hasil output Scatterplots sudah dapat terpenuhi dan memiliki model regresi yang baik dan ideal.

Rancangan Pengujian Hipotesis

Analisis hipotesa tentang pengaruh perlindungan hukum (X1), idealisme (X2), relativisme (X3) dan retaliasi (X4) terhadap intensi whistleblowing (Y) menggunakan analisis regresi berganda, koefisien determinasi R², uji signifikan simultan (uji F) dan uji signifikan parsial (uji t).

Hasil Analisis Regresi Berganda

Metode analisis ini digunakan untuk melakukan pengujian lebih dari satu variabel. Hasil analisis regresi berganda dapat disusun, sebagai berikut.

$$Y = 4,251 + 0,513X_1 + 0,314X_2 + (-0,016)X_3 + 0,064X_4 + e$$

Kesimpulan dari regresi berganda diatas adalah sebagai berikut:

1. Konstanta
Nilai konstanta 4,251, ini menunjukkan pengaruh positif variabel independen.
2. Perlindungan Hukum terhadap intensi whistleblowing
Nilai koefisien perlindungan hukum untuk variabel X1 sebesar 0,513. Hal ini mengartikan bahwa perlindungan hukum mempunyai hubungan positif dengan intensi whistleblowing dengan asumsi bahwa variabel independen yang lain dari model regresi adalah tetap.
3. Idealisme terhadap intensi whistleblowing
Nilai koefisien Idealisme untuk variabel X2 sebesar 0,314. Hal ini mengartikan bahwa idealisme mempunyai hubungan positif dengan intensi whistleblowing dengan asumsi bahwa

variabel independen yang lain dari model regresi adalah tetap.

4. Relativisme terhadap intensi whistleblowing
Nilai koefisien relativisme untuk variabel X3 sebesar -0,016 bertanda negatif. Hal ini mengartikan bahwa relativisme mempunyai hubungan berlawanan arah dengan intensi whistleblowing dengan asumsi bahwa variabel independen yang lain dari model regresi adalah tetap.
5. Retaliasi terhadap intensi whistleblowing
Nilai koefisien retaliasi untuk variabel X4 sebesar 0,064. Hal ini mengartikan bahwa retaliasi mempunyai hubungan positif dengan variabel intensi whistleblowing dengan asumsi bahwa variabel independen yang lain dari model regresi adalah tetap.

Uji Koefisien Determinasi R²

Berikut tabel yang menampilkan nilai uji koefisien determinasi R²

Tabel 4.13

R Square

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,617 ^a	0,380	0,368	2,69215

Diketahui nilai koefisien determinasi menggunakan output SPSS versi 20 bahwa nilai kontribusi perlindungan hukum, idealisme, relativisme, dan retaliasi, terhadap intensi whistleblowing (R Square) adalah 0,380. Artinya pengaruh variabel x1, x2, x3, dan x4 terhadap variabel y adalah sebesar 38%.

Pengujian Pengaruh Perlindungan Hukum, Idealisme, Relativisme dan Retaliasi Secara Bersama-Sama (Simultan) terhadap Intensitas Whistleblowing.

Tabel distribusi F adalah sebesar 2,42 dicari dengan menggunakan responden (n) = 200, k = 4. Hal ini bisa dilihat dari hasil perhitungan F (4 ; 196). Hasil uji F dengan menggunakan 200 sampel responden dalam menjawab kuesioner, tertera dibawah ini.

Tabel 4.14
Uji F (ANOVA)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F hitung	Sig.
1	Regression	867,301	4	216,825	29,917	,000^b
	Residual	1413,294	195	7,248		
	Total	2280,595	199			

Berdasarkan hasil output SPSS versi 20 pada tabel 4.14 diketahui bahwa nilai signifikan untuk pengaruh perlindungan hukum (X1), idealisme (X2), relativisme (X3) dan retaliasi (X4) secara simultan terhadap intensi whistleblowing (Y) adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai F hitung sebesar $29,917 > F$ tabel 2,42. Ditarik kesimpulan bahwa hipotesa alternatif (Ha) diterima dan hipotesa nol (H0) ditolak, sehingga pengujian perlindungan hukum, idealisme, relativisme dan retaliasi secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap intensi whistleblowing.

Uji t (Uji Parsial)

Tabel distribusi t adalah sebesar 1,97220 dicari dengan $\alpha = 5\%$, responden (n) = 200, k = 4, perhitungan rumus sebagai berikut.

t tabel = t (0,025 ; 200 – 4 -1)

t tabel = t (0,025 ; 195)

t tabel = 1,97220

Berikut ini hasil uji t dengan menggunakan 200 sampel responden dalam menjawab kuesioner, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.15
Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	4,251	0,975		4,360	0,000
1 Perlindungan hukum (x1)	0,513	0,089	0,396	5,754	0,000
Idealisme (x2)	0,314	0,082	0,278	3,848	0,000
Relativisme (x3)	-0,016	0,029	-0,035	-,565	0,573
Retaliasi (x4)	0,064	0,050	0,080	1,277	0,203

Tabel 4.15 menampilkan hasil uji t yang diketahui nilai thitung x1 sebesar 5,754 lebih besar dari ttabel 1,97220 dan nilai Sig 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima. Nilai thitung x2 sebesar 3,848 lebih besar dari ttabel 1,97220 dan nilai Sig 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima. Nilai thitung x3 sebesar -0,565 lebih kecil dari ttabel 1,97220 dan nilai Sig 0,573 lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak. Nilai thitung x4 sebesar 1,27 lebih kecil dari ttabel 1,97220 dan nilai Sig 1,277 lebih besar dari 0,05 jadi hipotesa ditolak.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Perlindungan Hukum, Idealisme Dan Relativisme Serta Retaliasi Secara Simultan terhadap Intensitas Whistleblowing.

Hasil pengujian hipotesis secara simultan yang telah dilakukan diketahui bahwa Fhitung 29,917 > Ftabel 2,42 dan nilai Sig 0,000 < 0,05, maka dinyatakan bahwa pengujian perlindungan hukum, idealisme, relativisme dan retaliasi berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap intensi whistleblowing. Arti dari hasil uji simultan ini adalah setiap peningkatan yang terjadi pada nilai perlindungan hukum dan idealisme dan retaliasi akan berpengaruh meningkatkan intensi whistleblowing. Sementara itu, semakin tinggi relativisme akan menurunkan tingkat intensi whistleblowing.

Pengaruh Perlindungan Hukum terhadap Intensitas Whistleblowing.

Berdasarkan hasil analisis regresi pada IBM SPSS versi 20 diketahui nilai t hitung 5,754 > t tabel 1,97220 dan nilai Sig 0,000 < 0,005. kesimpulan yang didapat adanya pengaruh yang signifikan antara perlindungan hukum (X1) terhadap intensi whistleblowing. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Yustrisia (2017) bahwa munculnya whistleblower signifikan untuk mengungkapkan kasus kecurangan ataupun korupsi di

Indonesia serta tingginya perlindungan hukum menciptakan keberanian individu melakukan whistleblowing. Kesimpulan yang diterima adalah H_a (hipotesis alternatif) dan H_0 (hipotesis nol) ditolak, maka secara parsial perlindungan hukum berpengaruh terhadap intensi whistleblowing dan mendukung penelitian sebelumnya.

Pengaruh Idealisme terhadap Intensi Whistleblowing.

Hasil Pengujian analisis regresi menggunakan IBM SPSS versi 20 diketahui nilai t hitung $3,848 > t$ tabel $1,97220$ dan nilai Sig $0,000 < 0,005$. Masing-masing uji memiliki nilai lebih besar dari kriteria dasar pengujian, maka adanya pengaruh yang signifikan antara idealisme (X_2) terhadap intensi whistleblowing. Hal ini memperlihatkan bahwa semakin tingginya tingkat idealisme akan menaikkan tingkat intensi whistleblowing di lingkungan mahasiswa. Hal ini juga mendukung penelitian Yulianto (2015) dimana idealisme mempunyai pengaruh positif terhadap whistleblowing artinya seseorang mempunyai tingkat pandangan yang tinggi terhadap intensi whistleblowing dan meyakini bahwa idealisme merupakan hal yang perlu diterapkan setiap individu. Kesimpulan dari hasil penelitian yang didapat bahwa H_a (hipotesis alternatif) diterima dan H_0 (hipotesis nol) ditolak. Artinya idealisme berpengaruh secara parsial terhadap intensi whistleblowing dan mendukung penelitian sebelumnya.

Pengaruh Relativisme terhadap Intensi Whistleblowing.

Hasil pengujian analisis regresi menggunakan IBM SPSS versi 20 diketahui nilai t hitung $-0,565 < t$ tabel $1,97220$ dan nilai Sig $0,573 > 0,005$. Kesimpulan yang didapat bahwa H_a (hipotesis alternatif) ditolak dan H_0 (hipotesis nol) diterima. Artinya yang didapat adanya tidak adanya pengaruh yang signifikan antara relativisme (X_3) terhadap intensi whistleblowing, dibuktikan dengan nilai t hitung memiliki nilai lebih kecil dari t tabel dan memiliki nilai yang negatif (berlawanan). Hal ini memperlihatkan bahwa relativisme tidak berpengaruh pada mahasiswa untuk melakukan whistleblowing.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Nayir & Herzig (2012) dan Yulianto (2015) menyatakan relativisme mempunyai pengaruh negatif

dan signifikan pada pengambilan keputusan etis auditor terhadap whistleblowing. Disimpulkan, apabila seseorang memiliki relativisme yang tinggi menjadikan intensi whistleblowing merupakan sikap yang kurang perlu dilakukan dan sebaliknya, semakin rendah orientasi etik relativisme memungkinkan mereka melakukan whistleblowing. Kesimpulan dari hasil yang didapat bahwa relativisme (X_3) secara parsial tidak berpengaruh terhadap intensi whistleblowing dan tidak selaras dengan penelitian sebelumnya.

Pengaruh Retaliasi terhadap Intensi Whistleblowing.

Berdasarkan hasil analisis regresi menggunakan IBM SPSS versi 20 diketahui nilai t hitung $1,277 < t$ tabel $1,97220$ dan nilai Sig $0,203 > 0,005$. Artinya tidak adanya berpengaruh yang signifikan antara retaliasi (X_4) terhadap intensi whistleblowing. Disimpulkan bahwa H_a (hipotesis alternatif) ditolak dan H_0 (hipotesis nol) diterima. Kesimpulan yang didapat bahwa retaliasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap intensi whistleblowing. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Miceli & Near (1994) menyebutkan bahwa retaliasi berpengaruh negatif terhadap intensi whistleblowing. Menunjukkan bahwa hubungan antara retaliasi, whistleblowing dan teori tindakan beralasan adalah benar, ketakutan akan retaliasi dapat dijadikan alasan yang kuat sehingga mereka memilih untuk tetap diam atau tidak melakukan intensi whistleblowing.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pengujian maka diperoleh hasil sebagai berikut.

1. Perlindungan hukum, idealisme, relativisme dan retaliasi berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap intensi whistleblowing.
2. Perlindungan hukum secara parsial berpengaruh terhadap intensi whistleblowing.
3. Idealisme berpengaruh secara parsial terhadap intensi whistleblowing.
4. Relativisme secara parsial tidak berpengaruh terhadap intensi whistleblowing.
5. Retaliasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap intensi whistleblowing.

Keterbatasan

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Pengambilan sampel dalam penelitian ini hanya mahasiswa yang berasal dari universitas negeri di Provinsi Aceh.
2. Hasil kesimpulan yang didasari oleh data primer yang telah dikumpulkan melalui kuesioner, sehingga bisa memunculkan kesalahan persepsi responden dalam menjawab kuesioner dengan kenyataan yang ada. Hal ini tidak dapat dikendalikan karena diluar kemampuan peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. W. (2017). Determinan Intensi Auditor Melakukan Tindakan Whistleblowing Dengan Perlindungan Hukum Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, (32), 385–407.
<https://doi.org/10.24034/J25485024.Y2017.V1.I3.2096>
- Aceh Indonesia. (2016). Suvey Fraud Indonesia.
- Ajzen, I. (1991). The Theory Of Planned Behavior. *Organizational Behavior And Human Decision Processes*, 50, 179–211.
[https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Buchan, H. F. (2005). Ethical Decision Making In The Public Accounting Profession: An Extension Of Ajzen's Theory Of Planned Behavior. *Journal Of Business Ethics*, 61(2), 165–181.
<https://doi.org/10.1007/S10551-005-0277-2>
- Chiu, R. K. (2002). Ethical Judgement, Locus Of Control, And Whistleblowing Intention: A Case Study Of Mainland Chinese Mba Students. *Managerial Auditing Journal*, 17(19), 7.
- Cordis, A. S., & Lambert, E. M. (2017). Whistleblower Laws And Corporate Fraud: Evidence From The United States. *Accounting Forum*, 41(4), 289–299.
<https://doi.org/10.1016/J.Accfor.2017.10.003>
- Forlap.Ristekdikti.Go.Id. (2017). Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi. Diambil Dari <https://forlap.ristekdikti.go.id/perguruan tinggi/> Search
- Forsyth, (1980). A Taxonomy Of Ethical Ideologies. *Journal Of Personality And Social Psychology*, 39, 175–184.
- Forsyth, D. . (1981). Moral Judgment: The Influence Of Ethical Ideology. *Personality And Social Psychology Bulletin*, Vol. 7 No., 218–22.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 19*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya.: Pt Bina Ilmu.
- Hersh, M. A. (2002). Whistleblower - Heroes Or Traitors?: Individual And Collective Responsibility For Ethical Behavior. *Pergamon*, 26(Annual Reviews In Control 26), 243–262. Diambil Dari [Www.Elsevier.Com/Locate/Arcontrol](http://www.Elsevier.Com/Locate/Arcontrol)
- Iai. (2016). *Kode Etik Akuntan Profesional*. Jakarta. Diambil Dari [Www.iaiglobal.Or.Id](http://www.iaiglobal.or.id)
- Ismail, S. (2014). Effect Of Ethical Ideologies On Ethical Judgment Of Future Accountants: Malaysian Evidence. *Asian Review Of Accounting*, 22(2), 145–158.
<https://doi.org/10.1108/Ara-08-2013-0052>
- Knkg. (2008). *Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran - Spp (Whistleblowing System - Wbs) 2008*.
- Kompas.Com. (2018). Artikel Ini Telah Tayang Di Kompas.Com Dengan Judul “Christopher Wylie, Mahasiswa Pengungkap Kebocoran Data Pengguna Facebook”, <https://tekno.kompas.com/read/2018/03/23/10010067/Christopher-Wylie-Mahasiswa-Pengungkap-Kebocoran-Data-Pengguna-Facebook>. Diambil Dari <https://tekno.kompas.com/read/2018/03/23/10010067/Christopher-Wylie-Mahasiswa-Pengungkap-Kebocoran-Data-Pengguna-Facebook>
- Kompasiana.Com. (2013). Whistleblowing. Diambil Dari <https://www.kompasiana.com/opieutopis/551c0591a33311182ab659fc/Whistleblowing>
- Mesmer-Magnus, J. R., & Viswesvaran, C. (2005). Whistleblowing In Organizations: An Examination Of Correlates Of Whistleblowing Intentions, Actions, And Retaliation. *Journal Of*

- Business Ethics*, 62(3), 277–297.
<https://doi.org/10.1007/S10551-005-0849-1>
- Miceli, M. P., & Near, J. P. (1994). Relationships Among Value Congruence, Perceived Victimization, and Retaliation Against Whistle-Blowers. *Journal Of Management*, Vol. 20, No. 4. 773–794, 20(4).
- Nayir, D. Z., & Herzog, C. (2012). Value Orientations As Determinants Of Preference For External And Anonymous Whistleblowing. *Journal Of Business Ethics*, 107(2), 197–213.
<https://doi.org/10.1007/S10551-011-1033-4>
- Near, J. P., & Miceli, M. P. (1985). Organizational Dissidence: The Case Of Whistle-Blowing. *Journal Of Business Ethics*, 4(1), 1–16.
<https://doi.org/10.1007/Bf00382668>
- Nixon, Syaruddin Kalo, Tan Kamello, M. M. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Usu Law Journal*, 2(2), 40–56.
- Poluakan, M. J., Saerang, D. P. E., & Lambey, R. (2017). Analisis Persepsi Atas Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Keinginan Seseorang Menjadi Whistleblower (Studi Kasus Pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi). *Jurnal Emba*, 5(2), 2695–2705.
- Rehg, M. T., Miceli, M. P., Near, J. P., & Van Scotter, J. R. (2008). Antecedents And Outcomes Of Retaliation Against Whistleblowers: Gender Differences And Power Relationships. *Organization Science*, 19(2), 221–240.
<https://doi.org/10.1287/Orsc.1070.0310>
- Riska. (2017). *Pengaruh Profesional Auditor, Orientasi Etika Idealisme, Dan Relativisme Terhadap Whistleblowing Dengan Sensitivitas Etis Sebagai Variabel Moderating*.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2013). *Research Method For Business* (Sixth Edit). Italy: Printer Trento Srl.
- Soerjono Soekanto. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Uj Presss.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D)*. Bandung: Alfabeta.
- Tempo.Co. (2018). Jokowi Teken Pp Pelapor Kasus Korupsi Diberi Hadiah Rp 200 Juta. Diambil Dari
<https://nasional.tempo.co/read/1134660/jokowi-teken-pp-pelapor-kasus-korupsi-diberi-hadiah-rp-200-juta/full&view=ok>
- Theatlantic.Com. (2014). Why Most Financial Whistle-Blowers Go Unheard. Diambil Dari
https://www.theatlantic.com/business/archive/2014/12/the-vast-majority-of-whistle-blowers-go-unheard/383705/?single_page=true
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Yulianto, R. D. A. (2015). *Pengaruh Orientasi Etika, Komitmen Profesional, Dan Sensitivitas Etis Terhadap Whistleblowing (Studi Empiris Pada Badan Pemeriksa Keuangan (Bpk) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Yustrisia, L. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Menara Ilmu*, Xi(75), 177–181.
- Zanaria, Y. (2011). Pengaruh Profesionalisme Audit, Intensitas Moral Untuk Melakukan Tindakan Whistleblowing (Studi Pada Kap Di Indonesia). *Menakar Peran Profesi Sebagai Engine Of Reform Dalam Pembangunan Global Berkelanjutan*, (Issn 2460-0784), 569–577.